












KARYA TULIS

E-MODUL INTERAKTIF MATERI “ KEBIJAKAN PUBLIK”

PETUNJUK PENGGUNAAN MEDIA

- Halaman utama terdapat dua pilihan yaitu  dan 
- Pilih tanda  untuk ke halaman utama
- Pilih  untuk menampilkan materi selanjutnya dan pilih  untuk tampilan sebelumnya
- untuk memulai mengerjakan evaluasi pilih 
- Pilih tombol , tombol , tombol  dan tombol  untuk memberikan jawaban. Soal berikutnya akan muncul jika anda telah memilih jawaban.
- Untuk memperoleh nilai, silahkan pilih tombol 

PUBLIC POLICY

MENGENAL KEBIJAKAN PUBLIK

MATERI

EVALUASI



Powered by :

Dra. Rosalina Ginting, M.Si
Dr. Maryanto, M.Si
Ika Menarianti, M.Kom.



kebijaksanaan publik
adalah apapun yang
pemerintah pilih
untuk dilakukan
atau tidak
dilakukan





kebijaksanaan adalah merupakan sebuah bagian dari aktifitas dan bukan sebuah keputusan sederhana untuk melakukan sesuatu (Richard Rose)

Alasan mempelajari kebijakan publik

KEILMUAN

PROFESSIONAL

POLITIS



kebijaksanaan public merupakan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh tubuh pemerintah dan secara resmi (Carl Friedrich)

Dasar analisis kebijakan

Analisis kebijakan lebih fokus pada penjelasan kebijakan daripada bagaimana menjadikannya layak



Sebab dan akibat dari kebijakan publik dengan setepat-tepatnya dicari dengan menggunakan metodologi keilmuan sosial



Usaha dibuat untuk mengembangkan kepercayaan teori yang general tentang kebijakan publik dan informasi mereka yang diterapkan pada agency dan wilayah kebijakan berbeda





DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

Thomas R. Dye (dalam Hegel Nagi S. Tangkikisan, 2003)
kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Anderson (1975)
kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

IMPLIKASI KEBIJAKAN (ANDERSON 1975)

- Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- Kebijakan publik bersifat positif dalam arti tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah atau bersifat negatif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- Kebijakan pemerintah didasarkan pada perpe



Dua aspek Pokok kebijakan



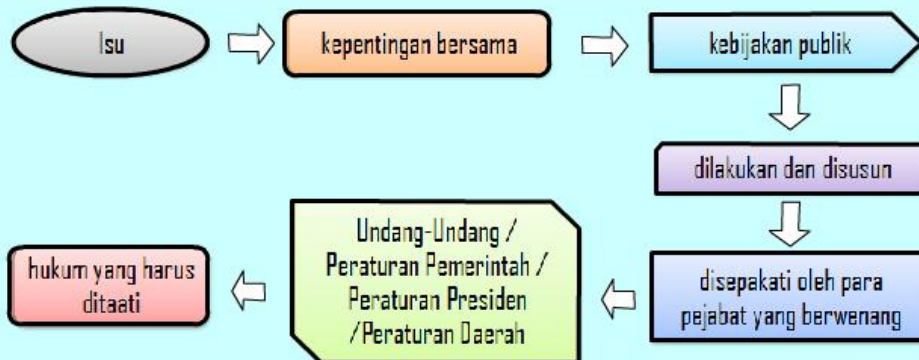
Policy merupakan praktika sosial yang tidak merupakan kejadian yang terisolir, artinya sesuatu yang dilakukan pemerintah berasal dari peristiwa/kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan untuk mengatasi masalah masalah masyarakat.

Policy merupakan usaha untuk mendamaikan pihak pihak yang sedang konflik atau merupakan incentive untuk tindakan bersama bagi pihak pihak yang terlibat menetapkan tujuan bersama tetapi mendapat perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.





Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya



Pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan yang secara umum dapat dibedakan menjadi



Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.



Kebijakan pelaksanaan, kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.



Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan



Kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik



Kebijakan publik

Masyarakat

Awal

Transisi

Dicita-citakan

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati



PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

John Dewey *The Theory of Inquiry* Dewey memberikan perhatian pada eksperimen cara mengukur kebijakan yang digambarkan bagaimana rencana tindakan harus dipilih dari alternative yang tersedia dan bagaimana Akibat-akibat yang dapat diamati dan digunakan untuk uji coba yang tepat. Harold Laswell seorang eksperimen ilmu politik dengan mempertajam ilmu policy sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dengan disiplin yang lain.





PUBLIC POLICY DAN ILMU POLITIK

Ilmu politik secara tradisional memusatkan perhatiannya pada struktur institusional dan pertimbangan pertimbangan filosofis dari pemerintah, yaitu meliputi studi tentang pengaturan-pengaturan institusional, seperti: pertimbangan pusat-daerah, pemisahan kekuasaan, kekuasaan dan tugas-tugas lembaga-lembaga Negara yang mencoba menerangkan institusi dimana public policy itu dibuat.



Perhatian yang besar oleh para ahli ilmu politik terhadap public policy dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Publik policy dapat dipelajari dengan alasan-alasan ilmiah yang betul-betul murni (purely scientific reason)

Publik policy juga dapat dipelajari untuk alasan profesional

Publik policy dapat dipelajari dengan tujuan-tujuan politis yang dipergunakan untuk memperoleh kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah yang tepat





Publik Policy dan Birokrasi

Public policy juga tidak dapat dipisahkan dengan birokrasi. karena pemerintah organisasinya disusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi dan mempunyai lingkup yang sangat luas

Apabila tugas pemerintah semakin luas maka mengakibatkan bertambahnya birokrasi. Artinya penguasa politik mendapat tambahan beban dan memaksa mereka untuk memikirkan perluasan infrastruktur birokrasi.

Dalam masyarakat pendelegasian urusan perencanaan dan pelaksanaan policy pada birokrasi dari penguasa politik. Sehingga penguasa politik memusatkan perhatian pada urusan pemilihan kebijakan dan menggantungkan perencanaan dan pelaksanaan policy pada infrastruktur birokrasinya.

Proses public policy menetapkan garis-garis umum dalam pemecahan masalah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga membutuhkan system untuk melaksanakan birokrasi



PUBLIC POLICY

MENGENAL KEBIJAKAN PUBLIK

MATERI

EVALUASI



Powered by :

Dra. Rosalina Ginting, M.Si
Dr. Maryanto, M.Si
Ika Menarianti, M.Kom.

PETUNJUK Pengerjaan

- 1) Berdoalah sebelum mengerjakan soal
- 2) Klik "MULAI" untuk memulai mengerjakan soal
- 3) Pilihlah jawaban yang menurut anda benar dengan meng klik opsi jawaban yang tersedia

MULAI

- 1) Sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan dinamakan

- A** Kebijakan Pendidikan
- B** Kebijakan Publik
- C** Kebijakan Pemerintah
- D** Kebijakan Pengusaha

- 2) kebijaksanaan adalah merupakan sebuah bagian dari aktifitas dan bukan sebuah keputusan sederhana untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini merupakan pendapat dari

- A** Thomas R. Dye
- B** Hegel
- C** Richard Rose
- D** Carl Friedrich

- 3) Yang bukan merupakan alasan mempelajari kebijakan publik yaitu

- A** Keuntungan
- B** Professional
- C** Politis
- D** Keilmuan

- 4) Pada dasar analisis kebijakan, Sebab dan akibat dari kebijakan publik dengan setepat-tepatnya dicari dengan menggunakan metodologi

- A** keilmuan publik
- B** keilmuan filsafat
- C** keilmuan tata negara
- D** keilmuan sosial

- 5) Berdasarkan implikasi kebijakan publik menurut Anderson (1975) bahwa kebijakan publik selalu

- A** mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan
- B** bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- C** didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat bebas
- D** berisi tindakan publik

6) Dalam dua aspek kebijakan, Policy merupakan praktika sosial dan Policy merupakan

- A Incentive
- B Practice
- C Representative
- D Transitive

7) Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai

- A Public Role
- B Public Policy
- C Public Obligation
- D Public Right

8) Yang bukan merupakan kebijakan secara umum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah

- A Kebijakan Pelaksana
- B Kebijakan Pengawasan
- C Kebijakan Teknis
- D Kebijakan Umum

9) John Dewey melakukan eksperimen cara mengukur kebijakan yang digambarkan bagaimana rencana tindakan harus dipilih dari alternative yang tersedia dan bagaimana

- A Manfaatnya
- B Tindakannya
- C Akibat-akibatnya
- D Tujuan-tujuannya

10) Yang bukan alasan-alasan perhatian besar oleh para ahli ilmu politik terhadap public policy adalah

- A Publik policy dapat dipelajari dengan alasan ilmiah
- B Publik policy dapat dipelajari dengan alasan professional
- C Publik policy dapat dipelajari dengan tujuan politis
- D Publik policy dapat dipelajari dengan alasan sosial

lihat nilai

MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM
PROGRAM KOMPUTER, E-MODUL INTERAKTIF MATERI “KEBIJAKAN PUBLIK”

1. Program Komputer, E-modul interaktif materi “Kebijakan Publik” ini dibuat menggunakan Corel Draw dan Macromedia Flash
2. Program dibuild dalam bentuk .swf
3. Untuk menjalankan E-modul interaktif materi “Kebijakan Publik” digunakan Interactive Whiteboard dan Komputer
4. Dalam pemutaran produk e-modul interaktif materi “Kebijakan Publik” perlu dipersiapkan laptop, speaker active dan LCD sehingga siswa mampu melihat, mendengarkan secara baik dan benar
5. Produk komputer berupa e-modul interaktif materi “Kebijakan Publik” dilengkapi menu materi dan Evaluasi.
6. Pengguna juga dapat mengetahui skor yang diperoleh setelah melakukan evaluasi